

HYBRID MODEL OF PARTICIPATORY AND DELIBERATIVE E-DEMOCRACY IN INDONESIA'S ELECTIONS

Dytha Ananda Widhiarso¹, Ali Ibrahim^{*2}

^{1,2}Information System, Faculty of Computer Science, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: ¹dytha.ananda24@gmail.com, ²aliibrahim@unsri.ac.id

(Article received: May 09, 2024; Revision: May 20, 2024; published: July 29, 2024)

Abstract

E-democracy is a branch e-government that uses information technology to support the process of implementing democracy. E-Democracy itself has several models that can be applied. The election process in Indonesia itself has 2 methods, namely Noken and individual, therefore, in this research the model focused on is the hybrid of participatory and deliberative model. This research aims to see the level of public readiness in using the e-democracy model for the implementation of General Elections. The research was carried out using the literature study method with a qualitative approach and accompanied by quantitative data collection using a questionnaire. The questionnaire was used to see the level of readiness to use the e-democracy model for elections. The questionnaire uses a mixture of TAM (Technology Acceptance Model) and DOI (Divergent of Innovation) methods. The results of this research show that the range of dimension index values is above 72%, with the highest value being 82% in the Calculation Results Dimension and 80% in the Perceived Usefulness Dimension. This shows that the public is ready to use e-democracy in the election process, and increases the possibility of using e-democracy in elections.

Keywords: Digital Democracy, E-Democracy, E-Election, E-Government.

MODEL HYBRID E-DEMOCRACY PARTICIPATORY DAN DELIBERATIVE DALAM PEMILU DI INDONESIA

Abstrak

*E-democracy merupakan salah satu cabang ilmu yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses pelaksanaan demokrasi. E-Democracy sendiri memiliki beberapa model yang dapat diterapkan. Proses pemilu di Indonesia sendiri memiliki 2 cara yakni Noken dan individu oleh karena itu, dalam penelitian ini model yang difokuskan adalah model hybrid *participatory* dan *deliberative*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesiapan masyarakat dalam menggunakan model *e-democracy* untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian dilakukan menggunakan metode study literature dengan pendekatan kualitatif dan diiringi dengan pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk melihat tingkat kesiapan penggunaan model *e-democracy* untuk pemilu. Kuesioner menggunakan campuran metode TAM (*Technology Acceptance Model*) dan DOI (*Divergent of Innovation*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa range nilai indeks dimensi yang sudah diatas 72%, dengan nilai tertinggi 82% pada Dimensi Hasil Perhitungan dan 80% pada Dimensi Kebergunaan (Dimensi Perceived of Usefulness). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menggunakan *e-democracy* dalam proses Pemilu, dan meningkatkan kemungkinan penggunaan *e-democracy* dalam pemilu.*

Kata kunci: Digital Democracy, E-Democracy, E-Election, E-Government.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan proses dan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Salah satu bagian dari proses demokrasi adalah pemilihan umum [1], [2]. Di Indonesia sendiri, Pemilihan Umum masih dilakukan secara *offline* tanpa alternatif yang dapat memaksa proses pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dilakukan selain

offline. Hal ini memicu munculnya masalah apabila terdapat keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan Pemilu secara konvensional. Seperti pada saat diberlangsungkannya Pilkada 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 yang menuai sentiment negatif dalam masyarakat [3].

Proses pemilihan umum di Indonesia sendiri terdiri dari 2 jenis yakni, sistem Noken dan sistem

pemilihan individu. Dalam sistem noken suara yang dihitung masuk melalui perwakilan daerah. Artinya, dalam proses pemilu pemegang suara dari daerah yang menggunakan sistem noken ini disampaikan oleh satu perwakilan daerah yang terpilih dan suara yang masuk dihitung sebagai suara keseluruhan masyarakat daerah tersebut. Contoh daerah yang menggunakan sistem noken adalah Papua.

E-Democracy muncul dari adanya permasalahan-permasalahan serupa dalam menjalankan kegiatan demokrasi [4]. Keinginan untuk membuat pelaksanaan demokrasi itu sendiri lebih mudah juga menjadi dasar dari munculnya *e-democracy* [5], [6]. *E-democracy* adalah salah satu cabang ilmu dalam *e-government*, pelaksanaannya memiliki konsep yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung adanya demokrasi seperti dalam proses pengambilan keputusan, debat, penyampaian aspirasi, pemilihan wakil rakyat, dsb [7]. Pemanfaatan sistem informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik [8].

Penerapan model *e-democracy* di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap model *e-democracy* yang ada [9], [10]. Hal ini terjadi karena, Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang diperkuat dengan adanya Pancasila [11], dan hal inilah juga yang menjadikan Indonesia unik [12].

Dalam paper ini, akan difokuskan pengembangan model *e-democracy* dilakukan dengan mengkombinasikan (*hybrid*) model *e-democracy* (spesifik *e-election*) untuk pemilihan umum [13] karena adanya perbedaan sistematis atau cara pelaksanaan Pemilu yang menggunakan sistem noken atau perwakilan per wilayah daerah, seperti yang dilakukan di Papua. Paper ini akan mengambil perspektif dari *readiness*/kesiapan masyarakat dalam menggunakan model *e-democracy* untuk Pemilu. Argumentasi lain adalah bahwa saat ini sudah ada beberapa model *e-democracy* yang diterapkan di negara-negara maju di dunia terutama negara di benua Eropa [14] yang dilakukan dengan menyesuaikan model *e-democracy* dengan model pemerintahan yang dilaksanakan [15]–[17], dengan begitu jalannya pemerintahan di negara tersebut tidak berbenturan dengan model *e-democracy* yang diterapkan. Model kombinasi *E-democracy* yang akan digunakan dalam paper ini adalah model *e-democracy Participatory*/Partisan dan model *E-Democracy Deliberative* [16], [18]. Dari sisi kontribusi pengetahuan model ini dapat memperkaya model-model *e-democracy* yang telah ada selama ini. Terutama untuk negara-negara yang menganut sistem/cara demokrasi yang serupa dengan demokrasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah nilai tingkat kesiapan (*readiness*) masyarakat dalam

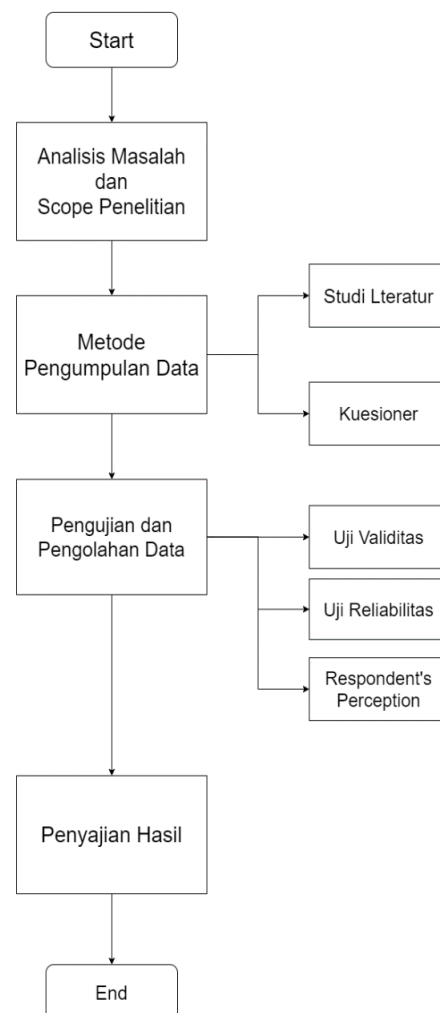
menggunakan model *e-democracy* untuk pemilu di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode study literature dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dimulai dengan mengembangkan asumsi dasar serta kerangka berpikir yang nantinya digunakan dalam penelitian [19]. Pada penelitian ini pendekatan kualitatif akan diikuti dengan dilakukannya pengumpulan data kuantitatif menggunakan angket/kuesioner.

2.1. Langkah Penelitian

Langkah dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis masalah dan menentukan *scope* atau batasan dari masalah yang akan diselesaikan, agar penyelesaian masalah nantinya akan lebih terarah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur dan kuesioner yang kemudian akan akan diuji dan diolah untuk mendapatkan hasil yang pada penelitian ini adalah nilai tingkat kesiapan

masyarakat dalam menggunakan *e-democracy* untuk Pemilu di Indonesia.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Konsep pelaksanaan penelitian dengan study literature mengacu pada penggunaan sumber buku, paper/jurnal dan internet [20]. Kemudian, dilakukan pengumpulan data kuantitatif yang difokuskan untuk melihat kesiapan masyarakat (yang mana berfokus pada masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, dan meleak teknologi) dalam menggunakan *e-democracy* pada proses pelaksanaan Pemilu yang kemudian diolah dan dianalisis. Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan menggunakan metode TAM. Penggunaan TAM akan memudahkan dalam menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi pengguna dalam menerima variabel terkait [21], yang dalam hal ini adalah penerapan *e-democracy* untuk Pemilu, (*Technology Acceptance Model*) untuk melihat *readiness* dan *acceptance* dan dikombinasikan dengan DOI (*Divergence of Innovation*) yang digunakan untuk menformulasikan instrumen yang sesuai dengan *principle* dari *hybrid* model *e-democracy* yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Prinsip Model E-Democracy Hybrid

Deliberative E-Democracy Model	Participatory E-Democracy Model
Absence of Coercive Power	Consistency
Balance Representation	Legal Framework
Structured Deliberation	Transparency
Security and Privacy	Equality
Accountability	Accessibility

Principle dari model *e-democracy* inilah yang digunakan untuk memformulasikan instrumen kuesioner menggunakan metode DOI yang kemudian ditambah dengan metode TAM sehingga didapatkan 13 dimensi yakni.

1. D_KP : Dimensi Kebiasaan Penggunaan Teknologi
2. D_PP : Dimensi Pemahaman Pemilu
3. D_HP : Dimensi Hasil Perhitungan
4. D_IT : Dimensi Infrastruktur Teknologi
5. D_LPP : Dimensi Lokasi Penyelenggaraan Pemilu
6. D_POU : Dimensi *Perceived of Usefulness*
7. D_PEOU : Dimensi *Perceived Ease of Use*
8. D_ATU : Dimensi *Attitude Toward Using*
9. D_CI : Dimensi *Continuity Intention*
10. D_AU : Dimensi *Actual Use*
11. D_PR : Dimensi *Perceived Risk*
12. D_PE : Dimensi *Perceived Enjoyment*
13. D_PT : Dimensi *Perceived Trust*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengolahan data dilakukan setelah semua respon dari terkumpul. Total Responden pada penelitian ini adalah sebanyak 116 orang. Pengujian data kuesioner dilakukan dengan menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Pengujian validitas dilakukan menggunakan bivariate correlation atau uji validitas Product Moment Pearson dengan $\alpha = 5\%$ dan tingkat signifikansi 95% . Pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS Ver.28.

Pada uji validitas ini, kevalidan suatu kuesioner dapat dilihat dengan membandingkan r hitung dengan r tabel.

- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid, karena tidak berkorelasi signifikan dngan skor total.
- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid.

Untuk mendapatkan nilai r tabel maka harus melihat pada tabel r. Untuk penelitian ini yang memiliki jumlah responden (N) sebanyak 116 orang. dF dari penelitian ialah sebanyak $116-2 = 114$. R tabel dari dF $114 = 0.1824$. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas.

Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Hasil
D_KP01	0.458	0.1824	Valid
D_KP02	0.709	0.1824	Valid
D_KP03	0.779	0.1824	Valid
D_KP04	0.717	0.1824	Valid
D_KP05	0.594	0.1824	Valid
D_PP01	0.772	0.1824	Valid
D_PP02	0.255	0.1824	Valid
D_PP03	0.803	0.1824	Valid
D_PP04	0.83	0.1824	Valid
D_PP05	0.834	0.1824	Valid
D_PP06	0.78	0.1824	Valid
D_PP07	0.793	0.1824	Valid
D_PP08	0.802	0.1824	Valid
D_HP01	0.766	0.1824	Valid
D_HP02	0.803	0.1824	Valid
D_HP03	0.804	0.1824	Valid
D_HP04	0.785	0.1824	Valid
D_HP05	0.796	0.1824	Valid
D_HP06	0.803	0.1824	Valid
D_IT01	0.716	0.1824	Valid
D_IT02	0.675	0.1824	Valid
D_IT03	0.705	0.1824	Valid
D_LPP01	0.737	0.1824	Valid
D_LPP02	0.729	0.1824	Valid
D_POU01	0.732	0.1824	Valid
D_POU02	0.76	0.1824	Valid
D_POU03	0.817	0.1824	Valid
D_POU04	0.792	0.1824	Valid
D_PEOU01	0.684	0.1824	Valid
D_PEOU02	0.69	0.1824	Valid
D_PEOU03	0.72	0.1824	Valid
D_ATU01	0.797	0.1824	Valid
D_ATU02	0.864	0.1824	Valid
D_CI01	0.822	0.1824	Valid
D_CI02	0.792	0.1824	Valid
D_CI03	0.812	0.1824	Valid
D_AU01	0.785	0.1824	Valid
D_AU02	0.802	0.1824	Valid
D_PR01	0.398	0.1824	Valid
D_PR02	0.392	0.1824	Valid
D_PR03	0.442	0.1824	Valid
D_PR04	0.436	0.1824	Valid
D_PE01	0.803	0.1824	Valid
D_PE02	0.809	0.1824	Valid
D_PE03	0.827	0.1824	Valid
D_PT01	0.798	0.1824	Valid
D_PT02	0.529	0.1824	Valid
D_PT03	0.728	0.1824	Valid

Dilihat dari hasil uji validitas pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel kuesioner dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas/*reliability test*. Uji Reliabilitas (*Reliability Test*) dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang diuji dapat mengukur sesuatu secara konsisten. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan (*reliability*) dari suatu instrumen. Uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan uji *Cronbach's Alpha* menggunakan software SPSS Statistics ver. 28. Instrumen dapat dikatakan *reliable* jika nilai koefisien reliabilitas instrumen tersebut lebih besar dari 0.6 (> 0.6).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.980	48

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji Cronbach alpha sama dengan 0,98, yang artinya lebih besar dari 0,6 (0,98>0,6), sehingga data yang diuji dinyatakan konsisten/*reliable*.

3.1. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan *Respondent's Perception* [22] untuk melihat hasil akhir pada setiap dimensi kuesioner sehingga didapatkan tingkat kesiapan masyarakat dalam menggunakan model *e-democracy* untuk Pemilu di Indonesia. Penghitungan ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

1. Menghitung frekuensi dari tiap skala jawaban pada masing-masing dimensi instrumen.

Tabel 4. Frekuensi Nilai Skala

Instrumen	Nilai				
	1	2	3	4	5
D_KP01	4	0	4	36	72
D_KP02	7	9	31	38	31
D_KP03	5	5	30	40	36
D_KP04	4	16	27	43	26
D_KP05	4	6	35	41	30
D_PP01	6	14	30	37	29
D_PP02	4	6	28	30	48
D_PP03	6	12	26	40	32
D_PP04	4	9	28	43	32
D_PP05	5	7	31	41	32
D_PP06	5	10	24	45	32
D_PP07	5	9	23	46	33
D_PP08	6	9	27	42	34
D_HP01	3	6	19	35	53
D_HP02	3	5	17	39	52
D_HP03	3	5	18	37	53
D_HP04	2	7	20	39	48
D_HP05	3	6	18	39	50
D_HP06	3	7	19	38	49
D_IT01	5	8	31	30	42
D_IT02	1	10	26	36	43
D_IT03	3	14	41	28	30
D_LPP01	3	11	29	42	31
D_LPP02	4	10	25	42	35
D_POU01	3	7	15	41	50
D_POU02	3	11	18	33	51
D_POU03	3	6	20	42	45

Instrumen	Nilai				
	1	2	3	4	5
D_POU04	2	6	33	40	35
D_PEOU01	1	8	28	39	40
D_PEOU02	1	7	31	48	29
D_PEOU03	1	4	35	47	29
D_ATU01	2	6	37	34	37
D_ATU02	2	9	26	39	40
D_CIO1	2	11	31	32	40
D_CIO2	2	13	32	34	35
D_CIO3	2	14	37	32	31
D_AU01	3	14	32	35	32
D_AU02	3	15	39	35	24
D_PR01	4	4	22	29	57
D_PR02	9	18	36	27	26
D_PR03	3	8	29	26	50
D_PR04	3	7	25	35	46
D_PE01	2	5	44	34	31
D_PE02	2	5	38	38	33
D_PE03	3	7	48	28	30
D_PT01	4	5	43	30	34
D_PT02	11	17	35	30	23
D_PT03	1	8	32	41	34

Penghitungan nilai tiap skala yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4, dilakukan untuk melihat jumlah/frekuensi dari setiap skala yang digunakan, dalam penelitian ini adalah skala linkert (1-5).

2. Setelah itu dilakukan interpretasi skor tertinggi dan terendah.

Interpretasi skor dilakukan dengan mengalikan nilai tertinggi atau terendah skala linkert dengan skor terendah jumlah responden yang ada.

$$Y = \frac{\text{Skor tertinggi skala linkert} \times \text{jumlah responden}}{\dots} \tag{1}$$

$$X = \frac{\text{Skor terendah skala linkert} \times \text{jumlah responden}}{\dots} \tag{2}$$

Sehingga

$$Y = 5 \times 116 = 580 \text{ dan } X = 1 \times 116 = 116$$

3. Kemudian dilakukan perhitungan skala linkert untuk mendapatkan nilai total skor tiap skala. Rumus Perhitungan Skala Linkert:

$$T \times P_n \tag{3}$$

Keterangan:

T: Total Jumlah Responden yang memilih

P_n: Pilihan Angka Skor Linkert

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Total Skor

Instrumen	Nilai					Total Skor
	1	2	3	4	5	
D_KP01	4	0	12	144	360	520
D_KP02	7	18	93	152	155	425
D_KP03	5	10	90	160	180	445
D_KP04	4	32	81	172	130	419
D_KP05	4	12	105	164	150	435
D_PP01	6	28	90	148	145	417
D_PP02	4	12	84	120	240	460
D_PP03	6	24	78	160	160	428

Instrumen	Nilai					Total Skor
	1	2	3	4	5	
D_PP04	4	18	84	172	160	438
D_PP05	5	14	93	164	160	436
D_PP06	5	20	72	180	160	437
D_PP07	5	18	69	184	165	441
D_PP08	6	18	81	168	170	443
D_HP01	3	12	57	140	265	477
D_HP02	3	10	51	156	260	480
D_HP03	3	10	54	148	265	480
D_HP04	2	14	60	156	240	472
D_HP05	3	12	54	156	250	475
D_HP06	3	14	57	152	245	471
D_IT01	5	16	93	120	210	444
D_IT02	1	20	78	144	215	458
D_IT03	3	28	123	112	150	416
D_LPP01	3	22	87	168	155	435
D_LPP02	4	20	75	168	175	442
D_POU01	3	14	45	164	250	476
D_POU02	3	22	54	132	255	466
D_POU03	3	12	60	168	225	468
D_POU04	2	12	99	160	175	448
D_PEOU01	1	16	84	156	200	457
D_PEOU02	1	14	93	192	145	445
D_PEOU03	1	8	105	188	145	447
D_ATU01	2	12	111	136	185	446
D_ATU02	2	18	78	156	200	454
D_CIO1	2	22	93	128	200	445
D_CIO2	2	26	96	136	175	435
D_CIO3	2	28	111	128	155	424
D_AU01	3	28	96	140	160	427
D_AU02	3	30	117	140	120	410
D_PR01	4	8	66	116	285	479
D_PR02	9	36	108	108	130	391
D_PR03	3	16	87	104	250	460
D_PR04	3	14	75	140	230	462
D_PE01	2	10	132	136	155	435
D_PE02	2	10	114	152	165	443
D_PE03	3	14	144	112	150	423
D_PT01	4	10	129	120	170	433
D_PT02	11	34	105	120	115	385
D_PT03	1	16	96	164	170	447

Tabel 5. Menunjukkan hasil perhitungan total skor bagi masing-masing elemen instrumen kuesioner. Perhitungan total skor dilakukan dengan cara mengalikan nilai skala linkert (1-5) dengan jumlah respon pada nilai tersebut, kemudian hasil total perkalian tersebut di tambahkan per-elemennya sehingga menghasilkan Total Skor per elemen instrumen mulai dari D_KP01 hingga D_PT03. Total skor inilah yang kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai indeks setiap elemen instrumen.

4. Melakukan pengindeksan dengan membagi total skor dengan interpretasiskor tertinggi dan kemudian dikali 100.

Indeks inilah yang akan menjadi hasil dari perhitungan *respondent/s perception* per-elemennya. Untuk menghitung Indeks tiap instrumen digunakan rumus:

$$Rumus\ Index\ \% = \frac{(Total\ Skor)}{Y \times 100} \quad (4)$$

Tiap nilai indeks memiliki keterangan yakni sebagai berikut:

- Angka 0% – 19,99% = Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali)
- Angka 20% – 39,99% = Tidak setuju / Kurang baik)

- Angka 40% – 59,99% = Cukup / Netral
- Angka 60% – 79,99% = (Setuju/Baik/suka)
- Angka 80% – 100% = Sangat (setuju/Baik/Suka)

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks syang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Nilai Indeks Elemen Instrumen

Instrumen	Total Skor	Indeks (%)	Keterangan
D_KP01	520	89.65517	Sangat Setuju
D_KP02	425	73.27586	Setuju
D_KP03	445	76.72414	Setuju
D_KP04	419	72.24138	Setuju
D_KP05	435	75	Setuju
D_PP01	417	71.89655	Setuju
D_PP02	460	79.31034	Setuju
D_PP03	428	73.7931	Setuju
D_PP04	438	75.51724	Setuju
D_PP05	436	75.17241	Setuju
D_PP06	437	75.34483	Setuju
D_PP07	441	76.03448	Setuju
D_PP08	443	76.37931	Setuju
D_HP01	477	82.24138	Sangat Setuju
D_HP02	480	82.75862	Sangat Setuju
D_HP03	480	82.75862	Sangat Setuju
D_HP04	472	81.37931	Sangat Setuju
D_HP05	475	81.89655	Sangat Setuju
D_HP06	471	81.2069	Sangat Setuju
D_IT01	444	76.55172	Setuju
D_IT02	458	78.96552	Setuju
D_IT03	416	71.72414	Setuju
D_LPP01	435	75	Setuju
D_LPP02	442	76.2069	Setuju
D_POU01	476	82.06897	Sangat Setuju
D_POU02	466	80.34483	Sangat Setuju
D_POU03	468	80.68966	Sangat Setuju
D_POU04	448	77.24138	Setuju
D_PEOU01	457	78.7931	Setuju
D_PEOU02	445	76.72414	Setuju
D_PEOU03	447	77.06897	Setuju
D_ATU01	446	76.89655	Setuju
D_ATU02	454	78.27586	Setuju
D_CIO1	445	76.72414	Setuju
D_CIO2	435	75	Setuju
D_CIO3	424	73.10345	Setuju
D_AU01	427	73.62069	Setuju
D_AU02	410	70.68966	Setuju
D_PR01	479	82.58621	Sangat Setuju
D_PR02	391	67.41379	Setuju
D_PR03	460	79.31034	Setuju
D_PR04	462	79.65517	Setuju
D_PE01	435	75	Setuju
D_PE02	443	76.37931	Setuju
D_PE03	423	72.93103	Setuju
D_PT01	433	74.65517	Setuju
D_PT02	385	66.37931	Setuju
D_PT03	447	77.06897	Setuju

Nilai indeks elemen instrumen pada tabel 6 kemudian digunakan untuk menghitung indeks perdimensi instrumen. Hal ini dilakukan dengan merata-ratakan hasil perhitungan perdimensi menggunakan nilai di tabel 6. Nilai indeks dimensi instrumen dapat dilihat pada tabel 7.

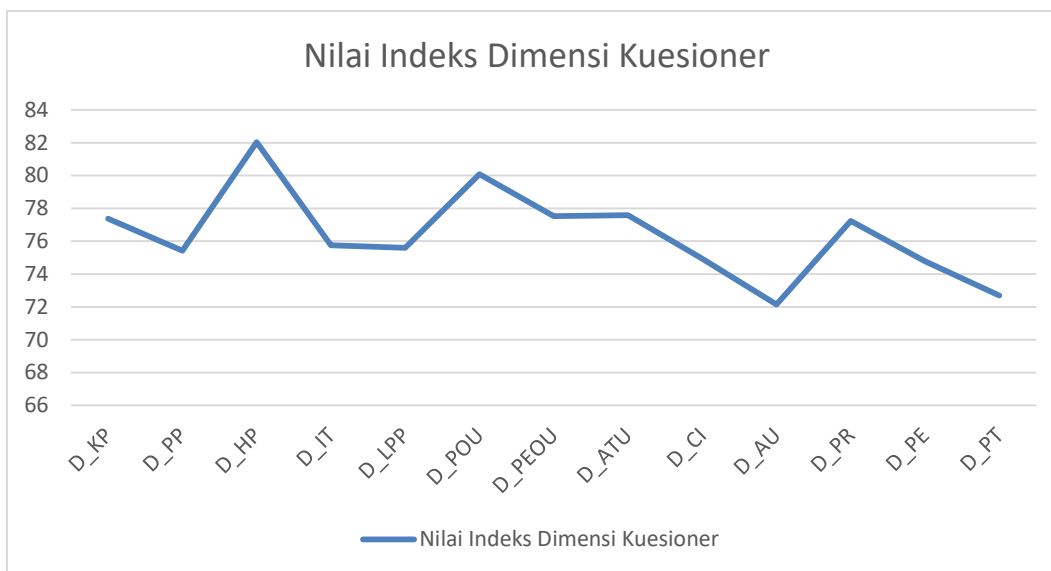
Penggambaran dari hasil perhitungan indeks juga disajikan dalam bentuk grafik yang dapat dilihat pada gambar 2. Dari tabel 7 dan grafik pada gambar 2, dapat dilihat bahwa seluruh dimensi kuesioner memiliki nilai yang cukup tinggi, terutama pada dimensi Hasil perhitungan (D_HP) dan Dimensi *Perceived of Usefulness* (D_POU). Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat kota Palembang sudah siap jika penerapan e-demokrasi dilakukan dalam proses pemilihan umum (Pemilu).

Tabel 7. Nilai Indeks Perdimensi

Instrumen	Indeks (%)	Keterangan
D_KP	77.37931	Setuju
D_PP	75.43103	Setuju
D_HP	82.04023	Sangat Setuju
D_IT	75.74713	Setuju

Instrumen	Indeks (%)	Keterangan
D_LPP	75.60345	Setuju
D_POU	80.08621	Sangat Setuju
D_PEOU	77.52874	Setuju
D_ATU	77.58621	Setuju
D_CI	74.94253	Setuju
D_AU	72.15517	Setuju
D_PR	77.24138	Setuju
D_PE	74.77011	Setuju
D_PT	72.70115	Setuju



Gambar 2. Grafik Nilai Indeks Dimensi

4. DISKUSI

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis dan Hasna berjudul "The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia" dibahas mengenai masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi jika Indonesia mengimplementasikan *e-democracy* kedalam kegiatan pemerintahan dan dampaknya bagi tingkat partisipasi politik di Indonesia. Namun, jika dilihat dari besarnya peningkatan penetrasi internet dan meningkatnya *e-participation* di Indonesia, *e-democracy* tetap dapat dilakukan bahkan untuk elections sekalipun apabila dilakukan dengan menggunakan model atau metode yang tepat [9].

Hal ini dibuktikan dalam penelitian di tahun selanjutnya mengenai penggunaan *e-democracy* dan kesiapan masyarakatnya pernah dibahas dalam penelitian terkait oleh Saud & Margono yang berjudul "Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation" yang membahas membahas peningkatan partisipasi di sisi *digital democracy* terutama dilihat dari semakin tingginya tingkat *political participation* yang dilakukan oleh kaum muda Indonesia, tinggi kemungkinan implementasi *e-demokrasi* untuk kegiatan demokrasi di Indonesia [23].

Untuk penerapan *e-democracy* dalam pemilihan umum, telah dibahas dalam penelitian Priambodo dan Sustikarini yang sama-sama membahas digital democracy di Indonesia pada pemilihan umum. Salah

satu bentuk implementasi model *e-democracy* yang dapat diterapkan dalam pemilihan umum adalah *e-voting* [12], [24]. *E-voting* sebagai bentuk penerapan *e-democracy* dalam pemilu pernah dibahas dalam penelitian yang dilakukan Bagaskoro, Tareq Muhammad, Sujadmiko, dan Sensuse membahas konsep dasar penggunaan *e-voting* dalam elections atau pemilihan umum di Indonesia [11], [22], [25], [26]. Sedangkan untuk penggunaan *e-voting* dalam pemilu luar negeri, baik dari sisi pelaksanaan hingga ke manfaat dan dampaknya dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Roblek, Marcos del Blanco, Isabelle Borucki dan H. Weistroffer, yang membahas penggunaan *e-voting* dalam pemilihan umum dilihat dari sisi yang berbeda dan di negara yang berbeda.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut terlihat bahwa peneapan *e-democracy* untuk Pemilu di Indonesia bukan hal yang jauh dari genggamannya. Melihat partisipasi demokrasi masyarakat yang semakin meningkat. Apabila dilakukan dengan model *e-democracy* yang tepat dan kesiapan yang matang maka *e-democracy* untuk pemilu ini bisa menjadi peluang pemecah masalah proses pemilu yang dilakukan secara tradisional. Oleh karena itulah dilakukan penghitungan tingkat readiness masyarakat untuk menggunakan model *hybrid e-democracy*, demi memastikan apabila *e-democracy* untuk pemilu benar dilakukan implementasinya akan tepat sasaran dan tepat guna.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa masyarakat sudah cukup siap menggunakan model *e-democracy* dalam proses pemilu. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks dimensi instrumen yang menampilkan *range* nilai diatas 72%. Nilai tertinggi berada pada dimensi hasil perhitungan dan *perceived of usefulness* yang mana menunjukkan kesiapan dan harapan jika penerapan *e-democracy* dalam pemilu dilakukan dengan benar maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan dan dapat memotong waktu dan *budget* yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Implementasi dari konsep *e-democracy* untuk pemilu ini dapat direalisasikan melalui *e-election* yang diterapkan melalui penggunaan *e-voting*, yang diharapkan dapat diteliti dalam penelitian mendatang. Dengan begitu semakin besar kemungkinan proses demokrasi terutama pemilu di Indonesia tak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu, dan dapat dilakukan secara *online*, sehingga memberikan hasil pemilu yang dapat dihitung dan dilihat secara real-time dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pada proses pemilu konvensional. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran kesiapan penggunaan model *e-democracy*, tetapi juga memiliki potensi pengembangan yang lebih tinggi dan lanjut dalam penggunaan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. I. F. Yagus Triana, Etika Khairina, "Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *J. Transform.*, vol. 9, no. 1, pp. 66–83, 2023, doi: 10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4.
- [2] T. Muhammad, A. Elven, and A. Al-muqorrobin, "Consolidating Indonesia's Fragile Elections Through E-Voting: Lessons Learned from India and the Philippines," *Indones. Comp. Law Rev.*, vol. 3, no. 1, pp. 63–80, 2020, doi: <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11298>.
- [3] A. Muzaki and A. Witanti, "Sentiment Analysis of the Community in the Twitter To the 2020 Election in Pandemic Covid-19 By Method Naive Bayes Classifier," *J. Tek. Inform.*, vol. 2, no. 2, pp. 101–107, 2021, doi: 10.20884/1.jutif.2021.2.2.51.
- [4] E. Handoyo, "Democratic Challenge in Digital Era," *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 66–85, 2020, doi: <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i1.23435>.
- [5] M. Ali, "E-GOVERNANCE AND E-DEMOCRACY: A DIGITAL REVOLUTION," *SSRN*, vol. 23529, no. 2, pp. 1–45, 2023.
- [6] Y. Kabanov, "Refining the UN E-participation Index: Introducing the deliberative assessment using the Varieties of Democracy data," *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 1, p. 101656, 2022, doi: 10.1016/j.giq.2021.101656.
- [7] H. R. Weistroffer, "Concepts of E-Democracy in an E-Society Association for Information Systems Concepts of E-Democracy in an E-Society," in *SAIS 2022 Proceedings .13*, 2022, no. March, pp. 1–6, [Online]. Available: <https://aisel.aisnet.org/sais2022/13>.
- [8] R. Andita and F. Aditya, "Systematic Literature Review on Information Security Risk Management in Public Service Organizations," *J. Tek. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 89–96, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2024.5.1.1223>.
- [9] M. S. Aziz and S. Hasna, "The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia," no. March, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.201219.071.
- [10] D. Helbing *et al.*, "Democracy by Design: Perspectives for Digitally Assisted, Participatory Upgrades of Society," *J. Comput. Sci.*, vol. 71, no. April, p. 102061, 2023, doi: 10.1016/j.jocs.2023.102061.
- [11] B. Sujadmiko, I. P. Panggar, A. Sofyansah, and I. F. Meutia, "The Concept of E-Voting Mechanism Based on Law of General Election and Information Security," *Jambe Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–36, 2020, doi: 10.22437/jlj.3.1.19-36.
- [12] A. Sustikarini, "Digital Democracy in Indonesia's 2019 Election: Between Citizen Participation and Political Polarization," *Int. Conf. Agric. Soc. Sci. Educ. Technol. Heal. (ICASSETH 2019)*, vol. 429, no. Icasseth 2019, pp. 238–242, 2020, doi: 10.2991/assehr.k.200402.055.
- [13] L. S. Yuliantini, M. Sukarno, and U. Nur, "Readiness of E-Voting in Welcoming E-Democracy: An Analysis of Mass Media," *Proceeding 2 Int. Conf. Sociol. , Univ. Mataram*, no. 7, pp. 293–302, 2022.
- [14] A. Ambrosino *et al.*, "Youth and Democracy: Digital Opportunities for the Future of Participation," in *Contributions to Political Science*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023, pp. 67–83.
- [15] L. Namayengo, M. Mbabazize, and R. Barigayomwe, "E-Enabling as a Technological Platform for Electoral Democracy in Uganda," *East African J. Interdiscip. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 197–219, 2023, doi: 10.37284/eajis.6.1.1343.
- [16] V. Roblek, I. Strugar, M. Mesko, M. P. Bach, and B. Jakovic, "E-democracy tools adoption: Experience of Austria, Croatia,

- Italy, and slovenia,” *2020 43rd Int. Conv. Information, Commun. Electron. Technol. MIPRO 2020 - Proc.*, no. October, pp. 1329–1335, 2020, doi: 10.23919/MIPRO48935.2020.9245352.
- [17] I. Borucki and F. Hartleb, “Debating E-voting throughout Europe: constitutional structures, parties’ concepts and Europeans’ perceptions,” *Front. Polit. Sci.*, vol. 5, 2023, doi: 10.3389/fpos.2023.982558.
- [18] R. Lindner and G. Aichholzer, *E-Democracy: Conceptual Foundations and Recent Trends*. 2020.
- [19] A. Ibrahim, Ermatita, and Saparudin, “Social Customer Relationship Management as a Communication Tool for Academic Communities in Higher Education Institutions through Social Media,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 13, no. 5, pp. 401–411, 2022, doi: 10.14569/IJACSA.2022.0130548.
- [20] Y. Lee, “Towards a more inclusive digital democracy in Asia: Introduction to the digital democracy special issue of *Asiascape: Digital Asia*,” *Asiascape Digit. Asia*, vol. 8, no. 3, pp. 135–138, 2021, doi: 10.1163/22142312-bja10017.
- [21] A. Ibrahim *et al.*, “The Analysis of E-Learning Model with Technology of Acceptance Model (TAM) Method in Faculty of Computer Science Sriwijaya University,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1338, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1338/1/012025.
- [22] D. I. Sensuse, P. B. Pratama, and Riswanto, “Conceptual model of e-voting in Indonesia,” *Proc. 2020 Int. Conf. Inf. Manag. Technol. ICIMTech 2020*, no. December, pp. 387–392, 2020, doi: 10.1109/ICIMTech50083.2020.9211156.
- [23] M. Saud and H. Margono, “Indonesia’s rise in digital democracy and youth’s political participation,” *J. Inf. Technol. Polit.*, vol. 18, no. 4, pp. 443–454, 2021, doi: 10.1080/19331681.2021.1900019.
- [24] B. Priambodo, “Control the State in the Era of Digital Democracy - The Case Study of East Java Elections in 2018,” in *Priambodo, B. (2019). Control the State in the Era of Digital Democracy - The Case Study of East Java Elections in 2018.*, 2019, no. ICoCSPA 2018, pp. 10–14, doi: 10.5220/0008815800100014.
- [25] B. Nur and A. Yogar, “Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) Toward Effective Electoral Affairs: The Implementation of E-Voting in the Village Chief Executive Election 2021,” pp. 28–36, 2023.
- [26] T. Muhammad, A. Elven, and A. Al-muqorrobini, “Consolidating Indonesia’s Fragile Elections Through E-Voting: Lessons Learned from India and the Philippines,” *Indones. Comp. Law Rev.*, vol. 3, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.18196/iclr.v3i1.11298>.